

**ANALISIS TINGKAT PENDEKATAN EFEKTIVITAS,  
EFISIENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA  
KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
KOTA SINGKAWANG 2017-2019**

**Tanggung Jawab Yuridis Kepada :**


**BIO ALLAMANDA**  
NIM. 171310486

**Program Studi Manajemen**

**Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus Dalam Ujian  
Skripsi/Komprehensif  
Pada Tanggal : 15 Maret 2022**

**Majelis Penguji :**

Pembimbing Utama

  
**Edy Suryadi, SE, MM**  
NIDN. 11-100263-01

Penguji Utama

  
**Dedi Hariyanto, SE, M**  
NIDN. 11-131177-02

Pembimbing Pembantu

  
**Fuad Ramdhan Ryanto, S.Ak, M.A**  
NIDN. 11-180391-01

Penguji Pembantu

  
**Heni Safitri, SE, MM**  
NIDN. 11-030289-01

Pontianak, 15 Maret 2022

Disahkan oleh :

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK  
DEKAN

  
**Dedi Hariyanto, SE, M**  
NIDN. 11-131177-02

**ANALISIS TINGKAT PENDEKATAN EFEKTIVITAS,  
EFISIENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA  
KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
KOTA SINGKAWANG 2017-2019**

**SKRIPSI**

OLEH :

**BIO ALLAMANDA  
NIM. 171310486**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK  
2021**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan hidayah yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis. Tidak lupa junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”Analisis Tingkat Efektivitas, Efisiensi Pajak Retribusi Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Kota Singkawang 2017-2019”**.

Pembuatan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, ST, M.Eng, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Dedi Hariyanto, SE., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Bapak Edy Suryadi, SE., MM., selaku pembimbing utama, yang telah memberi bimbingan, petunjuk dan motivasi kepada peneliti sampai penelitian ini selesai.

4. Bapak Fuad Ramdhan Ryanto, SE.AK., M.AK., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan motivasi kepada peneliti sampai penelitian ini selesai.
5. Segenap Dosen dan staf akademik yang telah membantu dan membimbing penelitian ini sampai pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tua yaitu Bapak Kamsulludin S.Pd dan Ibu Ruslah yang telah mendoakan dalam setiap sujudnya, memberikan nasihat dan do'a serta dukungan moral dan material sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris, Bapak Kepala Bidang Pajak dan Retribusi dan staf-staf yang ada di Badan Keuangan Daerah Singkawang yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi dan membantu dalam penyediaan data.
8. Yang terisitimewa kepada teman-teman yang selama ini telah membantu saya dan memberi saya semangat dalam menyusun skripsi teruntuk Alda Putrisari, Ahmad Rifqi, Titin Salasiah, dan Fitry.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak Angkatan 2017, kepada teman-teman kelas 11 serta teman-teman Universitas Muhammadiyah Pontianak.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk para pembaca.

Pontianak, 12 April 2021

Bio Allamanda  
171310486

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi pajak retribusi daerah serta kontribusi pada pendapatan asli daerah Kota Singkawang. Data yang dipergunakan adalah data Tahun 2017-2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik dokumentasi

Hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk Efektivitas Pajak Daerah termasuk kriteria sangat efektif, Efektivitas Retribusi Daerah sebesar 78,93% termasuk kriteria kurang efektif, Efisiensi Pajak Daerah bernilai rata-rata sebesar 0,89% termasuk kriteria efisien, Efisiensi Retribusi termasuk kriteria efisien. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk kriteria sangat kurang berkontribusi dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk kriteria sangat kurang berkontribusi.

**Kata Kunci: Efektifitas, Efisiensi, Retribusi dan Kontribusi.**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Pembatasan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kerangka Pemikiran.....	8
G. Metode Penelitian	
1. Jenis penelitian.....	12
2. Teknik Pengumpulan Data.....	12
3. Teknik Analisis Data.....	12

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Otonomi Daerah .....	16
B. Tujuan Otonomi Daerah.....	17
C. Pendapatan Asli Daerah .....	17
D. Pajak Daerah .....	18
E. Sistem Pemungutan Pajak.....	21
F. Retribusi Daerah.....	22
G. Efektivitas.....	32
H. Efisiensi.....	33
I. Kontribusi.....	33

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Badan Keuangan Kota Singkawang.....	35
B. Visi dan Misi .....	36

C. Struktur Organisasi.....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Efektivitas Pajak Daerah.....	80
B. Analisis Efektivitas Retribusi Pajak Daerah .....	81
C. Analisis Efisiensi Pajak Daerah .....	82
D. Analisis Efisiensi Retribusi Pajak Daerah.....	83
E. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD .....	85
F. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD .....	86
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang Tahun 2017-2019.....	5
Tabel 1.2 Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	6
Tabel 1.3 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	6
Tabel 1.4 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah.....	13
Tabel 1.5 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah .....	14
Tabel 1.6 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah .....	14
Tabel 1.7 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah.....	15
Tabel 4.1 Analisis Efektivitas Pajak Daerah.....	81
Tabel 4.2 Analisis Efektivitas Retribusi Pajak Daerah .....	82
Tabel 4.3 Analisis Efisiensi Pajak Daerah .....	84
Tabel 4.4 Analisis Efisiensi Retribusi Pajak Daerah .....	85
Tabel 4.5 Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD.....	86
Tabel 4.6 Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD .....	88

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	11
Gambar 3.1 Struktur Badan Keuangan Kota Singkawang.....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran.....	92
Lampiran 2 Pemungutan Pajak Daerah.....	98
Lampiran 3 Pemungutan Retribusi Daerah .....	99

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih di era otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan dana dan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan daerah dan pengeluaran rutin. PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan sumber penerimaan daerah yang penting dalam upaya peningkatan otonomi daerah.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, tentang pemerintah daerah, merupakan awal dimulainya otonomi daerah, yaitu diberikannya peran lebih besar kepada kabupaten atau kota untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan juga kemasyarakatan harus sesuai dengan aspirasi dari masyarakat daerah yang bersangkutan. Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah adalah setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komponen pendapatan asli daerah yang memiliki peranan penting adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah harus mengetahui dan dapat mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Apabila tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis.

Pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah).

Efisiensi biaya pengeluaran dapat diartikan efisien yang ukuran masukannya sudah tertentu yaitu biaya atau pengeluaran untuk pemungutan Pajak Daerah sedangkan keluarannya dapat diukur dengan keberhasilan penerimaan Pajak Daerah sehingga Efisiensi pajak daerah dibutuhkan untuk menghitung nilai berdasarkan presentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah.

Efektivitas juga merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai potensi kerja dari suatu unit kerja yang menghitung efektivitas pajak daerah karena efektivitas merupakan upaya mengerjakan semua pekerjaan secara tepat (*doing the right job*), dengan menggunakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki dan sesuai dengan tujuan operasional. Analisis efektivitas dilakukan untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.

Kesejahteraan masyarakat akan tergantung pada pemerintah daerah atau otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan daerah.

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Kontribusi dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD, sehingga perlu dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kemampuan dua unsur tersebut yang mampu dipungut dan ditarik dari masyarakat oleh pemerintah daerah sebagai sumber daya pembiayaan finansial dalam operasional pemerintahan daerah melalui PAD untuk keberhasilan otonomi dan pembangunan Daerah.

Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada di pulau Kalimantan, dengan ibu kota atau pusat pemerintahan berada di Kota Pontianak yang terdiri dari 14 Kabupaten/Kota yaitu 12 Kabupaten dan 2 Kota. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu peningkatan efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya melalui identifikasi subjek dan objek dari pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitu pula halnya Kota Singkawang yang merupakan salah satu Kota di

Kalimantan Barat yang juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kota Singkawang maka diharapkan Kota Singkawang mampu menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Singkawang. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Singkawang, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian ini dicantumkan Target Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi selama Tahun 2017-2019 dari Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Adapun nilai Target Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang**  
**Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>Tingkat Capaian (%)</b>
2017	137.788.933.987,00	132.099.418.843,54	95,87
2018	154.358.330.760,00	130.864.903.685,88	84,78
2019	180.424.370.397,00	166.200.436.090,04	92,12

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, Tahun 2017-2019.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat capaian Realisasi Tahun 2017 sebesar 95,87%, di Tahun 2018 tingkat capaian Realisasi mengalami penurunan hingga 84,78% dan pada Tahun 2019 mengalami peningkatan capaian Realisasi sebesar 92,12%. Pendapatan daerahnya tidak mencapai target yang di buat Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, hal



ini mengindikasikan bahwa PAD yang dalam pelaksanaannya kurang maksimal.

Selanjutnya data yang dicantumkan adalah nilai Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang**  
**Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**  
**Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>
2017	36.820.000.000,00	7.366.230.000,00
2018	43.570.000.000,00	7.776.230.000,00
2019	48.565.000.000,00	5.890.248.950,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, Tahun 2017-2019.

Berdasarkan tabel 1.2 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2017-2018 sebesar 18,33% dan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 11,46%. Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2017-2018 sebesar 5,56% dan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 24%. Dari hal tersebut dapat dibandingkan bahwa Pendapatan tertinggi Kota Singkawang bersumber dari Pajak Daerah. Selanjutnya data yang dicantumkan adalah Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang**  
**Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**  
**Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Biaya Pemungutan Pajak Daerah</b>	<b>Biaya Pemungutan Retribusi Daerah</b>
2017	1.969.054.365,57	264.617.489,36
2018	2.410.790.156,48	276.095.157,58
2019	2.794.038.015,04	276.427.556,35

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, Tahun 2017-2019.

Berdasarkan Tabel 1.3 Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2017-2018 sebesar 22,43% dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2018-2019 mengalami penurunan hingga 15,89%. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2017-2019 sebesar 4,33% dan Biaya Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0,12%. Dari penjelasan tersebut dapat dibandingkan bahwa Biaya Pemungutan tertinggi dari Pajak Daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa di daerah membutuhkan dan mengeluarkan dana untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik. Salah satunya dengan berusaha meningkatkan penerimaan PAD. Pemerintahan perlu mengidentifikasi tentang sumber PAD yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah apakah sudah efektif dan efisien. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Tingkat Efektivitas, Efisiensi Pajak Retribusi Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Singkawang 2017-2019”** .

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi pada PAD Kota Singkawang?”.

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka penulis melakukan pembatasan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Objek penelitian yang di pilih adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) di Kota Singkawang.
2. Periode penelitian yang digunakan yaitu pada Tahun 2017-2019.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan dengan pendekatan efektivitas, efisiensi pajak dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Singkawang.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan peneliti dan sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang sesungguhnya.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan bagi instansi terhadap pokok masalah yang terjadi dan memaksimalkan kinerja keuangan dalam instansi melalui analisis efektivitas dan efisiensi dalam retribusi, pajak dan kontribusinya.

3. Bagi Almamater

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang mengambil judul dengan topik yang serupa khususnya mahasiswa pada Prodi

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Muhammadiyah Pontianak.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Menurut Pekei (2016:69) : “Efektivitas adalah hubungan Antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi”.

Menurut Mardiasmo (2013:12) : “Efektivitas pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Sedarmayanti (2014:22) : “Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat”. Dengan demikian Efisiensi Pajak Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah.

Menurut Suandy (2016:37) : “Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya terdapat pada pemerintah daerah dalam pelaksanaannya melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)”.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah berupa untuk kepentingan pribadi atau badan”.

Menurut Mahmudi (2012:145) : “Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD”

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan umum dan cara perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

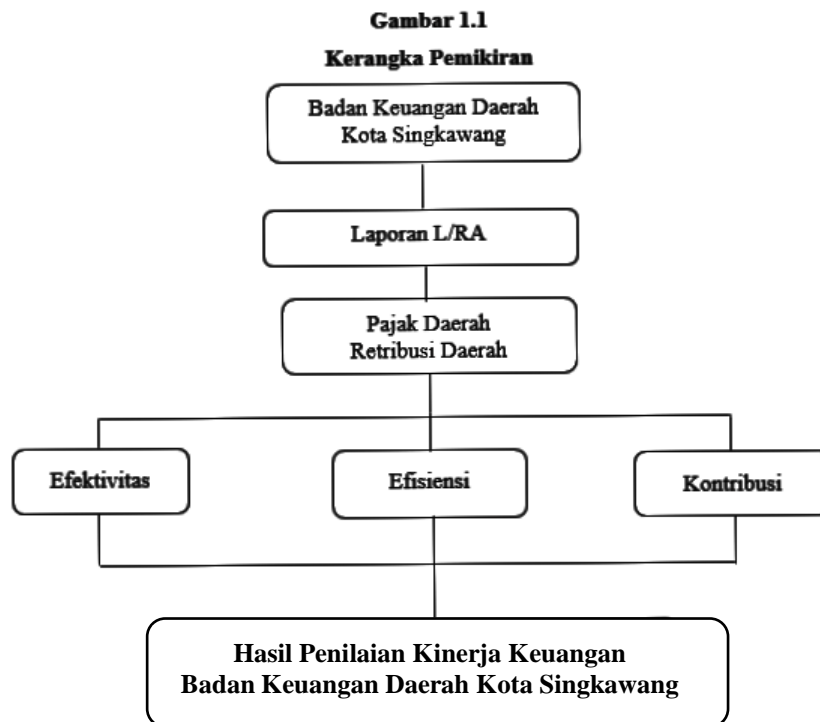
Berikut adalah hasil ringkasan penelitian terdahulu :

1. Elfayang dan Rohman (2014) dengan judul “Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013” dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah sudah bisa memanfaatkan potensi yang ada akan tetapi belum bisa merealisasikannya dengan baik. Sedangkan untuk efektivitas retribusi daerah selama 5 tahun menunjukkan rata-rata rasio yang sangat efektif. Kecuali tahun 2009 dan 2010 yang masuk kategori efektif. Jadi dapat dikatakan kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah tidak sama kontribusinya terhadap PAD.
2. Yosia dan Mario (2018) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Tuban pada tahun 2013-2017” dapat disimpulkan bahwa untuk bidang efisiensi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Tuban cenderung mengalami peningkatan. Untuk efektivitas penarikan pajak daerah ada penurunan sedikit, sedangkan untuk kontribusi pajak daerah terhadap PAD ada penurunan karena sebagian wajib pajak apabila dilakukan pemungutan pajak ada banyak resistensi karena kurang.

3. Irwan dan Haruni (2018) dengan judul “Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Retribusi dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2016” dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Banggai pada tahun 2012-2016 mencerminkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang efisien. Tingkat efektivitas Kabupaten Banggai tahun 2012-2016 menunjukkan tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah sangat baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menyajikan kerangka pemikiran sebagai berikut



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:35) : “Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (indenpenden) tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain”.

Menurut Arikunto (2013:27) : “Penelitian kuantitatif adalah penelitian sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya”.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono (2017:137) : “Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung meberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

Menurut Silaen dan Widiyono (2013:163) : “Dokumentasi adalah peninggalan tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian dari suatu organisasi yang segi waktu teliti belum terlalu lama”. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan ialah Laporan Realisasi Anggaran.

## 3. Teknik Analisis Data

### a. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2014:135)

**Tabel 1.4**  
**Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah**

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
> 90-100%	Efektif
> 80-90%	Cukup Efektif
> 60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Pekei (2016:76)

### b. Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2014:135)



**Tabel 1.5**  
**Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100%	Sangat Efektif
> 90-100%	Efektif
> 80-90%	Cukup Efektif
> 60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Pekei (2016:76)

**c. Analisis Efisiensi Pajak Daerah**

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak daerah adalah pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5%.

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002

**d. Analisis Efisiensi Retribusi Daerah**

$$\text{Efisiensi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi retribusi daerah adalah pengelolaan retribusi daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pengmungan tidak melebihi 5%.

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002

**e. Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

$$\text{Kontribusi PD pada PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Handoko (2013:3)

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut :

**Tabel 1.6**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
0%-10%	Sangat Kurang
> 10%-20%	Kurang
> 20%-30%	Sedang
> 30%-40%	Cukup Baik
> 40%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Handoko (2013:3)

**f. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

$$\text{Kontribusi RD pada PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan RD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2014:163)

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut :

**Tabel 1.7**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
0%-10%	Sangat Kurang
> 10%-20%	Kurang
> 20%-30%	Sedang
> 30%-40%	Cukup Baik
> 40%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Halim (2011:220)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, untuk rata-rata Tahun 2017-2019 kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Singkawang bernilai rata-rata sebesar 110,89% termasuk kriteria sangat efektif. Sedangkan Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah bernilai rata-rata sebesar 78,93% termasuk kriteria kurang efektif.
2. Tingkat Efisiensi Pajak Daerah bernilai rata-rata sebesar 0,89% termasuk kriteria efisien. Sedangkan Tingkat Efisiensi Retribusi Daerah bernilai rata-rata sebesar 1,28% termasuk kriteria efisien.
3. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah bernilai rata-rata sebesar 0,32% termasuk kriteria sangat kurang berkontribusi. Sedangkan Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah bernilai rata-rata sebesar 0,03% termasuk kriteria sangat kurang berkontribusi.

#### **B. Saran**

Saran yang bisa diberikan kepada pihak Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

1. Untuk BKD Kota Singkawang tetap memperhatikan konsistensi yang selaras dengan tren persentasenya karena terlihat naik dan turun (fluktuatif), BKD harus lebih melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan kepada para wajib pajak mengenai pentingnya pajak agar

kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak sebagai sumber pendapatan daerah agar pajak semakin meningkat dan dapat meningkatkan kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang untuk pengembangan Kota Singkawang kedepannya.

2. Untuk penelitian selanjutnya, menggunakan periode penelitian hingga 5 Tahun.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, M. Faisal. 2014. **Dasar-Dasar Manajemen Keuangan**. Cetakan Keempat. Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Arikunto, S. 2013. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. Edisi Revisi. PT. Renika Cipta, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun Tahun 2002. Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- Elfayang Rizky Ayu Puspitasari dan Abdul Rohman. 2014. Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*. Vol. 03 (04), 1-15.
- Mahsun. 2013. **Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya**. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mahmudi. 2016. **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2015. **Manajemen Kinerja Sektor Publik**. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2014. **Akuntansi Keuangan Daerah**. Selemba Empat, Jakarta.
- Handoko P, Sri. 2013. “Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak”.
- Mardiasmo. 2013. **Perpajakan**. Andi, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2019. **Perpajakan**. Andi, Yogyakarta.

- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Taushia, Jakarta.
- Sedermayanti. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama, Bandung.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Edisi 7. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Yosia, Dian Purnama Windrayadi dan Mario Fahmi Syahrial. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban. *Majalah Ilmiah Solusi*. Vol. 16 (03), 94-10

## Lampiran 1

## Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2019



**Pemerintah Kota Singkawang**  
**Laporan Realisasi Anggaran**  
**Untuk Tahun Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016**

Uraian	Reff.	31 Desember 2017			Realisasi 31 Desember 2016
		Anggaran	Realisasi	%	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>7.2.4</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>7.2.4.1</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	7.2.4.1.1	36.820.000.000,00	39.381.087.311,44	106,96	29.627.562.130,21
Pendapatan Retribusi Daerah	7.2.4.1.2	7.366.230.000,00	5.292.349.787,36	71,85	5.388.723.831,06
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.2.4.1.3	4.309.820.337,00	4.309.820.337,00	100,00	3.221.676.236,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.2.4.1.4	89.292.883.650,00	83.116.161.407,74	93,08	65.018.386.063,09
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>137.788.933.987,00</b>	<b>132.099.418.843,54</b>	<b>95,87</b>	<b>103.256.348.260,36</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>7.2.4.2</b>				
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>		<b>609.448.696.315,00</b>	<b>598.621.659.819,00</b>	<b>98,22</b>	<b>605.912.734.981,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	7.2.4.2.1	15.720.858.557,00	13.638.536.343,00	86,75	15.774.844.469,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.2.4.2.2	3.290.514.758,00	1.780.615.343,00	54,11	1.026.019.512,00
Dana Alokasi Umum	7.2.4.2.3	492.487.388.000,00	492.487.388.000,00	100,00	501.293.503.000,00
Dana Alokasi Khusus	7.2.4.2.4	97.949.935.000,00	90.715.120.133,00	92,61	87.818.368.000,00
<b>Transfer Pemerintahan Pusat Lainnya</b>		<b>49.523.279.000,00</b>	<b>43.791.163.520,00</b>	<b>88,43</b>	<b>35.354.514.000,00</b>
Dana Penyesuaian	7.2.4.2.5	49.523.279.000,00	43.791.163.520,00	88,43	35.354.514.000,00
<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>		<b>46.128.867.764,00</b>	<b>43.275.261.763,75</b>	<b>93,81</b>	<b>40.490.332.720,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	7.2.4.2.6	46.128.867.764,00	42.765.850.676,00	92,71	40.490.332.720,00
Dana Bagi Hasil Lainnya	7.2.4.2.7	0,00	509.411.087,75	100,00	0,00
<b>Bantuan Keuangan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114.800.000,00</b>
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	7.2.4.2.8	0,00	0,00	0,00	5.114.800.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>705.100.843.079,00</b>	<b>685.688.085.102,75</b>	<b>97,25</b>	<b>686.872.381.701,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>7.2.4.3</b>				
Pendapatan Hibah	7.2.4.3.1	23.449.000.000,00	28.169.446.744,46	120,13	0,00
Pendapatan Lainnya	7.2.4.3.2	271.822.576,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>23.720.822.576,00</b>	<b>28.169.446.744,46</b>	<b>118,75</b>	<b>0,00</b>

<b>JUMLAH PENDAPAT AN</b>		<b>866.610.599.642,00</b>	<b>845.956.950.690,75</b>	<b>97,62</b>	<b>790.128.729.961,36</b>
<b>BELANJA</b>	<b>7.2.5</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.2.5.1</b>				
Belanja Pegawai	7.2.5.1.1	362.931.626.620,00	329.872.272.728,00	90,89	397.842.954.286,00
Belanja Barang dan Jasa	7.2.5.1.2	262.514.719.925,00	244.273.529.692,34	93,05	173.188.178.009,00
Belanja Hibah	7.2.5.1.3	29.704.948.910,00	26.077.309.464,00	87,79	26.017.018.900,00
Belanja Bantuan Sosial	7.2.5.1.4	9.348.805.000,00	8.889.195.000,00	95,08	683.940.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>664.500.100.455,00</b>	<b>609.112.306.884,34</b>	<b>91,66</b>	<b>597.732.091.195,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.2.5.2</b>				
Belanja Modal Tanah	7.2.5.2.1	16.824.346.475,00	11.799.025.000,00	70,13	3.118.738.195,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.2.5.2.2	46.479.473.649,00	44.636.100.255,00	96,03	49.862.991.301,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.2.5.2.3	45.200.695.025,00	42.226.068.745,00	93,42	44.910.145.108,10
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.2.5.2.4	98.143.014.675,00	96.391.084.596,00	98,21	125.689.328.126,00

Uraian	Reff.	31 Desember 2017			Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	31 Desember 2016
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.2.5.2.5	4.017.428.200,00	3.933.378.400,00	97,91	7.906.043.490,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>210.664.958.024,00</b>	<b>198.985.656.996,00</b>	<b>94,46</b>	<b>231.487.246.220,10</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.2.5.3</b>				
Belanja Tidak Terduga	7.2.5.3.1	528.744.525,00	222.663,00	0,04	74.796.448,00
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>		<b>528.744.525,00</b>	<b>222.663,00</b>	<b>0,04</b>	<b>74.796.448,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>875.693.803.004,00</b>	<b>808.098.186.543,34</b>	<b>92,28</b>	<b>829.294.133.863,10</b>
<b>TRANSFER</b>	<b>7.2.6</b>				
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>7.2.6.1</b>				<b>958.287.046,00</b>
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-Bantuan kepada Partai Politik	7.2.6.1.1	803.396.025,00	706.620.363,00	87,95	803.387.046,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Kecamatan/Kelurahan	7.2.6.1.2	0,00	0,00	0,00	154.900.000,00
<b>Jumlah Transfer</b>		<b>803.396.025,00</b>	<b>706.620.363,00</b>	<b>87,95</b>	<b>958.287.046,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>876.497.199.029,00</b>	<b>808.804.806.906,34</b>	<b>92,28</b>	<b>830.252.420.909,10</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(9.886.599.387,00)</b>	<b>37.152.143.784,41</b>		<b>(40.123.690.947,74)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>7.2.7</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.2.7.1</b>				
Penggunaan SiLPA	7.2.7.1.1	3.580.168.691,00	3.580.168.691,00	100,00	49.703.859.638,84
Penerimaan Kembali Investasi Non-Permanen	7.2.7.1.2	0,00	44.564.272,00	100,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		18.306.430.696,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>7.2.7.2</b>	<b>21.886.599.387,00</b>	<b>3.624.732.963,10</b>	<b>16,56</b>	<b>49.703.859.638,84</b>



<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b> Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah <b>Jumlah Pengeluaran</b> <b>Pembiayaan Daerah</b>  <b>Pembiayaan Neto</b>  <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	7.2.7.2.1	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00
		<b>12.000.000.000,00</b>	<b>12.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>
		<b>9.886.599.387,00</b>	<b>(8.375.267.036,90)</b>		<b>43.703.859.638,84</b>
		<b>0,00</b>	<b>28.776.876.747,51</b>		<b>3.580.168.691,10</b>

**Pemerintah Kota Singkawang**  
**Laporan Realisasi Anggaran**  
**Untuk Tahun Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017**

Urain	Reff.	31 Desember 2018			Realisasi 31 Desember 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>7.2.4</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>7.2.4.1</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	7.2.4.1.1	43.570.000.000,00	48.215.803.129,57	110,66	39.381.087.311,44
Pendapatan Retribusi Daerah	7.2.4.1.2	7.766.230.000,00	5.521.903.151,55	71,10	5.292.349.787,36
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.2.4.1.3	5.185.000.000,00	5.185.336.109,00	100,01	4.309.820.337,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.2.4.1.4	97.837.100.760,00	71.941.861.295,76	73,53	83.116.161.407,74
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>154.358.330.760,00</b>	<b>130.864.903.685,88</b>	<b>84,78</b>	<b>132.099.418.843,54</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>7.2.4.2</b>				
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>		<b>638.087.177.000,00</b>	<b>615.164.298.429,00</b>	<b>96,41</b>	<b>598.621.659.819,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	7.2.4.2.1	15.728.768.000,00	13.002.346.987,00	82,67	13.638.536.343,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.2.4.2.2	4.297.467.000,00	4.272.454.327,00	99,42	1.780.615.343,00
Dana Alokasi Umum	7.2.4.2.3	492.487.388.000,00	492.487.388.000,00	100,00	492.487.388.000,00
Dana Alokasi Khusus	7.2.4.2.4	125.573.554.000,00	105.402.109.115,00	83,94	90.715.120.133,00
<b>Transfer Pemerintahan Pusat Lainnya</b>		<b>47.283.820.000,00</b>	<b>44.260.191.450,00</b>	<b>93,61</b>	<b>43.791.163.520,00</b>
Dana Penyesuaian	7.2.4.2.5	47.283.820.000,00	44.260.191.450,00	93,61	43.791.163.520,00
<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>		<b>57.610.006.092,00</b>	<b>57.614.088.619,00</b>	<b>100,01</b>	<b>43.275.261.763,75</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	7.2.4.2.6	57.610.006.092,00	57.614.088.619,00	100,01	42.765.850.676,00
Dana Bagi Hasil Lainnya	7.2.4.2.7	0,00	0,00	0,00	509.411.087,75
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>742.981.003.092,00</b>	<b>717.038.578.498,00</b>	<b>96,51</b>	<b>685.688.085.102,75</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>7.2.4.3</b>				
Pendapatan Hibah	7.2.4.3.1	23.449.000.000,00	31.052.200.000,00	132,42	28.169.446.744,46
Pendapatan Lainnya	7.2.4.3.2	0,00	135.088.279,91	-	0,00
				-	
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>23.449.000.000,00</b>	<b>31.187.288.279,91</b>	<b>133,00</b>	<b>28.169.446.744,46</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>920.788.333.852,00</b>	<b>879.090.770.463,79</b>	<b>95,47</b>	<b>845.956.950.690,75</b>
<b>BELANJA</b>	<b>7.2.5</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.2.5.1</b>				
Belanja Pegawai	7.2.5.1.1	423.833.004.846,51	372.846.358.044,00	87,97	329.872.272.728,00
Belanja Barang dan Jasa	7.2.5.1.2	230.823.525.361,00	193.865.664.551,31	83,99	244.273.529.692,34

Belanja Hibah	7.2.5.1.3	33.856.787.614,00	31.464.569.536,00	92,93	26.077.309.464,00
Belanja Bantuan Sosial	7.2.5.1.4	6.129.756.000,00	5.981.594.600,00	97,58	8.889.195.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>694.643.073.821,51</b>	<b>604.158.186.731,31</b>	<b>86,97</b>	<b>609.112.306.884,34</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.2.5.2</b>				
Belanja Modal Tanah	7.2.5.2.1	19.001.691.056,00	17.517.606.638,00	92,19	11.799.025.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.2.5.2.2	65.659.468.142,00	61.779.529.496,00	94,09	44.636.100.255,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.2.5.2.3	41.378.298.380,00	35.074.950.740,00	84,77	42.226.068.745,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.2.5.2.4	136.120.457.794,00	122.291.439.180,00	89,84	96.391.084.596,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.2.5.2.5	6.078.530.563	5.580.964.916,00	91,81	3.933.378.400,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>268.238.445.935,00</b>	<b>242.244.490.970,00</b>	<b>90,31</b>	<b>198.985.656.996,00</b>

Uraian	Reff.	31 Desember 2018			Realisasi 31 Desember 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.2.5.3</b>				
Belanja Tidak Terduga	7.2.5.3.1	900.000.000,00	126.853.055,00	14,09	222.663,00
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>		<b>900.000.000,00</b>	<b>126.853.055,00</b>	<b>14,09</b>	<b>222.663,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>963.781.519.756,51</b>	<b>846.529.530.756,31</b>	<b>87,83</b>	<b>808.098.186.543,34</b>
<b>TRANSFER</b>	<b>7.2.6</b>				
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>7.2.6.1</b>				
Transfer Bantuan Keuangan	7.2.6.1.1	860.340.843,00	820.509.999,00	95,37	706.620.363,00
Lainnya-Bantuan kepada Partai Politik					
<b>Jumlah Transfer</b>		<b>860.340.843,00</b>	<b>820.509.999,00</b>	<b>95,37</b>	<b>706.620.363,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>964.641.860.599,51</b>	<b>847.350.040.755,31</b>	<b>87,84</b>	<b>808.804.806.906,34</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(43.853.526.747,51)</b>	<b>31.740.729.708,48</b>	<b>(72,38)</b>	<b>37.152.143.784,41</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>7.2.7</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.2.7.1</b>				
Penggunaan SiLPA	7.2.7.1.1	28.776.916.747,51	28.776.916.747,51	100,00	3.580.168.691,10
Penerimaan Kembali Investasi Non-Permanen	7.2.7.1.2	0,00	0,00	0,00	44.564.272,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	7.2.7.1.3	31.076.610.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>59.853.526.747,51</b>	<b>28.776.916.747,51</b>	<b>48,08</b>	<b>3.624.732.963,10</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.2.7.2</b>				
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.2.7.2.1	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00	12.000.000.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>		<b>16.000.000.000,00</b>	<b>16.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.000.000.000,00</b>
<b>Pembiayaan Neto</b>		<b>43.853.526.747,51</b>	<b>12.776.916.747,51</b>	<b>29,14</b>	<b>(8.375.267.036,90)</b>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		0,00	44.517.646.455,99	28.776.876.747,51

**Pemerintah Kota Singkawang**  
**Laporan Realisasi Anggaran**  
**Untuk Tahun Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018**

Uraian	Reff.	31 Desember 2019			Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	31 Desember 2018
<b>PENDAPATAN</b>	<b>7.2.4</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>7.2.4.1</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	7.2.4.1.1	48.565.000.00 0,00	55.880.760.30 7,90	115,06	48.215.803.12 9,57
Pendapatan Retribusi Daerah	7.2.4.1.2	5.890.248.950 ,00	5.528.551.127 ,00	93,86	5.521.903.151 ,55
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.2.4.1.3	5.185.000.000 ,00	5.242.664.299 ,00	101,11	5.185.336.109 ,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.2.4.1.4	120.784.121.4 47,00	99.548.460.35 6,14	82,42	71.941.861.29 5,76
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>180.424.370.397,00</b>	<b>166.200.436.090,04</b>	<b>92,12</b>	<b>130.864.903.685,88</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>7.2.4.2</b>				
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>		<b>635.167.005.000,00</b>	<b>623.989.674.865,00</b>	<b>98,24</b>	<b>615.164.298.429,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	7.2.4.2.1	12.969.955.000 ,00	9.715.654.087 ,00	74,91	13.002.346.987 ,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.2.4.2.2	5.052.803.000 ,00	4.518.775.790 ,00	89,43	4.272.454.327 ,00
Dana Alokasi Umum	7.2.4.2.3	518.961.237.000,00	518.961.237.000,00	100,00	492.487.388.000,00
Dana Alokasi Khusus	7.2.4.2.4	98.183.010.000 ,00	90.794.007.988 ,00	92,47	105.402.109.115,00
<b>Transfer Pemerintahan Pusat Lainnya</b>		<b>45.456.892.000,00</b>	<b>40.557.140.390,00</b>	<b>89,22</b>	<b>44.260.191.450,00</b>
Dana Penyesuaian	7.2.4.2.5	45.456.892.000 ,00	40.557.140.390 ,00	89,22	44.260.191.450 ,00
<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>		<b>41.668.257.266,00</b>	<b>57.753.413.989,00</b>	<b>138,60</b>	<b>57.614.088.619,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	7.2.4.2.6	41.668.257.266 ,00	57.753.413.989 ,00	138,60	57.614.088.619 ,00
Dana Bagi Hasil Lainnya	7.2.4.2.7	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>722.292.154.266,00</b>	<b>722.300.229.244,00</b>	<b>100,00</b>	<b>717.038.578.498,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.2.4.3</b>				
Pendapatan Hibah	7.2.4.3.1	23.449.000.000 ,00	31.482.388.000 ,00	134,26	31.052.200.000 ,00
Pendapatan Lainnya	7.2.4.3.2	0,00	25.433.727,00		135.088.279,91
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>		<b>23.449.000.000,00</b>	<b>31.507.821.727,00</b>	<b>134,37</b>	<b>31.187.288.279,91</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>926.165.524.663,00</b>	<b>920.008.487.061,04</b>	<b>99,34</b>	<b>879.090.770.463,79</b>

Uraian	Reff.	31 Desember 2019			Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	31 Desember 2018
<b>BELANJA</b>	<b>7.2.5</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.2.5.1</b>				
Belanja Pegawai	7.2.5.1.1	444.835.433.0 86,00	374.627.261.4 54,00	84,22	372.846.358.0 44,00
Belanja Barang dan Jasa	7.2.5.1.2	274.207.520.4 42,00	241.837.708.5 96,46	88,20	193.865.664.5 51,31
Belanja Hibah	7.2.5.1.3	41.211.678.07 5,00	38.722.528.40 3,00	93,96	31.464.569.53 6,00
Belanja Bantuan Sosial	7.2.5.1.4	5.535.248.000 ,00	4.834.094.000 ,00	87,33	5.981.594.600 ,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>765.789.879.603,00</b>	<b>660.021.592.453,46</b>	<b>86,19</b>	<b>604.158.186.731,31</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.2.5.2</b>				
Belanja Modal Tanah	7.2.5.2.1	1.027.550.000 ,00	868.644.710,0 0	84,54	17.517.606.63 8,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.2.5.2.2	84.872.779.64 9,99	80.193.751.52 4,00	94,49	61.779.529.49 6,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.2.5.2.3	44.388.679.84 1,00	40.873.287.91 7,00	92,08	35.074.950.74 0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.2.5.2.4	91.830.533.92 4,00	82.491.676.71 8,00	89,83	122.291.439.1 80,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.2.5.2.5	3.663.407.258 ,00	3.911.474.150 ,00	106,77	5.580.964.916 ,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>225.782.950.672,99</b>	<b>208.338.835.019,00</b>	<b>92,27</b>	<b>242.244.490.970,00</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.2.5.3</b>				
Belanja Tidak Terduga	7.2.5.3.1	1.000.000.000 ,00	0,00	-	126.853.055,0 0
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>126.853.055,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>992.572.830.275,99</b>	<b>868.360.427.472,46</b>	<b>87,49</b>	<b>846.529.530.756,31</b>
<b>TRANSFER</b>	<b>7.2.6</b>				
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>7.2.6.1</b>				
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-Bantuan kepada Partai Politik	7.2.6.1.1	860.340.843,0 0	799.526.323,0 0	92,93	820.509.999,0 0
<b>Jumlah Transfer</b>		<b>860.340.843,00</b>	<b>799.526.323,00</b>	<b>92,93</b>	<b>820.509.999,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>993.433.171.118,99</b>	<b>869.159.953.795,46</b>	<b>87,49</b>	<b>847.350.040.755,31</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(67.267.646.455,99)</b>	<b>50.848.533.265,58</b>	<b>(75,59)</b>	<b>31.740.729.708,48</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>7.2.7</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.2.7.1</b>				
Penggunaan SiLPA	7.2.7.1.1	44.517.646.45 5,99	44.507.732.63 7,59	99,98	28.776.916.74 7,51
Penerimaan Kembali Investasi Non-Permanen	7.2.7.1.2			-	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	7.2.7.1.3	32.000.000.00 0,00	0,00	-	0,00

Uraian	Reff.	31 Desember 2019			Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	31 Desember 2018
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>76.517.646.45</b>	<b>44.507.732.63</b>		<b>28.776.916.74</b>
		<b>5,99</b>	<b>7,59</b>	<b>58,17</b>	<b>7,51</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.2.7.</b>				
<b>2</b>					
Penyertaan Modal/Investasi	7.2.7.	9.250.000.000	8.000.000.000		16.000.000.00
Pemerintah Daerah	2.1	,00	,00	86,49	0,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>		<b>9.250.000.000</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>86,49</b>	<b>16.000.000.00</b>
		<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>86,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Pembiayaan Neto</b>		<b>67.267.646.45</b>	<b>36.507.732.63</b>	<b>54,27</b>	<b>12.776.916.74</b>
		<b>5,99</b>	<b>7,59</b>		<b>7,51</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>			<b>87.356.265.90</b>		<b>44.517.646.45</b>
			<b>3,17</b>		<b>5,99</b>

## Lampiran 2

### Penjelasan pemungutan pajak daerah 2017-2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Hotel	1.950.000.000,00	2.135.429.967,00
2.	Pajak Restoran	4.200.000.000,00	4.844.087.374,00
3.	Pajak Hiburan	1.900.000.000,00	2.363.915.071,00
4.	Pajak Reklame	650.000.000,00	810.714.030,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	12.500.000.000,00	12.934.377.304,00
6.	Pajak Parkir	250.000.000,00	306.142.200,00
7.	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	25.318.200,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	8.208.100,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	235.832.690,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.000.000.000,00	5.845.697.761,00
11.	Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	9.000.000.000,00	9.871.364.614,44
	<b>TOTAL</b>	<b>36.820.000.000,00</b>	<b>39.381.087.311,44</b>

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	3.174.104.554,00
2.	Pajak Restoran	5.300.000.000,00	6.235.094.993,00
3.	Pajak Hiburan	2.800.000.000,00	3.044.422.573,00
4.	Pajak Reklame	750.000.000,00	677.700.566,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	13.500.000.000,00	14.092.395.500,00
6.	Pajak Parkir	350.000.000,00	404.357.706,00
7.	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	23.103.000,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	5.261.000,00

9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	230.609.858,00
<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.500.000.000,00	6.874.602.651,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.000.000.000,00	13.454.150.728,57
	<b>Total</b>	<b>43.570.000.000,00</b>	<b>48.215.803.129,57</b>

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Hotel	3.200.000.000,00	4.188.540.498,70
2.	Pajak Restoran	6.895.000.000,00	9.495.726.434,70
3.	Pajak Hiburan	3.100.000.000,00	3.540.380.831,00
4.	Pajak Reklame	750.000.000,00	879.517.658,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	14.350.000.000,00	14.859.156.893,00
6.	Pajak Parkir	900.000.000,00	1.011.373.626,00
7.	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	23.785.560,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	7.401.300,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	195.801.088,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.500.000.000,00	6.858.720.708,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.500.000.000,00	14.820.355.710,50
	<b>Total</b>	<b>48.565.000.000,00</b>	<b>55.880.760.307,90</b>

### Lampiran 3

#### Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2017-2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>A.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000,00	1.125.220.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	450.000.000,00	396.643.000,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	372.699.500,00
4	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	73.080.000,00
5	Retribusi Pelayanan Persampahan	1.100.000.000,00	774.860.000,00
6	Retribusi Pelayanan Pasar	400.000.000,00	308.120.000,00
<b>B.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	105.242.500,00
2	Retribusi Terminal	40.000.000,00	47.040.000,00
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	10.000.000,00	4.520.750,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	183.230.000,00	172.314.000,00
<b>C.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>		
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.250.000.000,00	1.275.853.054,36

2	Retribusi Izin Gangguan	1.033.000.000,00	636.756.983,00
	<b>Total A+B+C</b>	<b>7.366.230.000,00</b>	<b>5.292.349.787,36</b>

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>A.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000,00	1.336.205.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	408.882.400,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	375.000.000,00	378.610.000,00
4	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	480.430.000,00
5	Retribusi Pelayanan Persampahan	1.100.000.000,00	752.725.000,00
6	Retribusi Pelayanan Pasar	400.000.000,00	258.250.000,00
<b>B.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	17.837.500,00
2	Retribusi Terminal	60.000.000,00	70.070.000,00
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	15.000.000,00	0,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	183.230.000,00	219.106.000,00
<b>C.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>		
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.250.000.000,00	1.594.821.251,55
2	Retribusi Izin Gangguan	1.033.000.000,00	4.666.000,00
3	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	300.000,00
	<b>Total A+B+C</b>	<b>7.766.230.000,00</b>	<b>5.521.903.151,55</b>

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>A.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.352.018.950,00	1.299.165.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	900.000.000,00	832.396.000,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	750.000.000,00	437.858.400,00
4	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	311.050.000,00
5	Retribusi Pelayanan Persampahan	375.000.000,00	358.262.000,00
6	Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	742.820.000,00
<b>B.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	73.612.398,00
2	Retribusi Terminal	65.000.000,00	50.883.000,00
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	183.230.000,00	224.194.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	15.000.000,00	-

<b>C.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>		
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.250.000.000,00	1.198.310.329,00
2	Retribusi Izin Gangguan		
3	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		
	<b>Total A+B+C</b>	<b>5.890.248.950,00</b>	<b>5.528.551.127,00</b>